

# **MOTIF TIONGKOK MENINGKATKAN KERJA SAMA DENGAN MEKONG RIVER COMMISSION**

**Oleh: Dinda Mei Sari**

dindameisari98@gmail.com

**Pembimbing: Dr. Yessi Olivia, S.IP, M.Int.Rel**

Bibliografi: 10 Buku, 21 Jurnal, 12 Dokumen Resmi, 2 Skripsi dan 25 Situs Web

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km.12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 07561-63277

## ***Abstract***

*The focus of this research is to analyze the motives of China to increase cooperation with the Mekong River Commission, an organization whose members are lower Mekong basin countries, namely Thailand, Laos, Cambodia, and Vietnam. China, which is the upper Mekong, was initially not at all interested in working with the MRC and was only content with dialog partner status. However, since the 2000s, China, with its steadily increased power and hegemonic projection in the region, has changed its approach in dealing with the MRC. China has shown a great interest in increasing cooperation with the MRC. This change certainly raises a question to China's grown interest in MRC.*

*This research uses the neorealism perspective that focuses on how states interact in order to survive the anarchical international system. Neorealism considers that international cooperation will open up opportunities to achieve the power to fulfill national interests, especially to maintain the existence of the state (survival). By becoming a hegemon, a country can influence policies in international cooperation to reach national interests. Data collection in this research was collected through literature study.*

*This research shows that China's motive for increasing cooperation with the MRC is because China needs the energy of the Mekong River to fulfill its growing energy demand. China then built a hydropower dam project on the Mekong River. In responding to various criticisms and rejection of dam construction, China used its hegemonic status by persuading the downstream countries through investment and following cooperation rules that benefited China economically.*

***Keywords: China, Mekong River Commission, Hegemon, Mekong River and Hydropower***

## PENDAHULUAN

Penelitian ini adalah penelitian tentang kerja sama internasional yang melibatkan negara–negara dalam memanfaatkan sumber daya alam. Objek dari penelitian ini adalah negara–negara yang terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Mekong di kawasan Asia Tenggara. Secara geografis, panjang Sungai Mekong mencapai 4900 km dan mengalir melalui beberapa negara dimulai dari Tiongkok dan Myanmar di bagian hulu sungai dan berlanjut ke kawasan hilir sungai di Laos, Thailand, Kamboja dan berakhir di Vietnam. Sungai ini menghasilkan DAS seluas 795.000 km<sup>2</sup> yang terdistribusi antara bagian hulu dan hilir. Aliran sungai yang mengalir di bagian hulu terdiri dari Tiongkok (21%) dan Myanmar (3%), sedangkan bagian hilir terdiri dari Laos (25%), Thailand (23%), Kamboja (20%) dan Vietnam (8%).<sup>1</sup>

Aliran air tersebut mengairi hutan dan lahan basah yang digunakan untuk bahan bangunan, obat-obatan dan makanan. Sungai Mekong juga memainkan peran penting dalam mendukung mata pencaharian masyarakat lokal, menyediakan lingkungan yang produktif untuk pertanian, akuakultur, perikanan tangkap, barang air non-ikan dan pariwisata. Selain itu, Sungai Mekong juga memberi manfaat tidak langsung namun sama pentingnya seperti mitigasi banjir, penyimpanan air dan pengolahan air limbah.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> “Mekong Basin: Geography, Population and Climate,” *Food and Agriculture Organization of the United Nations*, diakses pada 9 Februari 2019, <http://www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/mekong/index.stm>

<sup>2</sup> “About Mekong River Commission,” *Mekong River Commission*, 2010, diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB, <http://www.mrcmekong.org/about-mrc/>

Gambar 1. Peta Sungai Mekong



sumber: [www.mrcmekong.org](http://www.mrcmekong.org)

Untuk menjaga potensi sumber daya alam Sungai Mekong tetap berkembang dan tidak menjadi sumber konflik bagi negara–negara sekitar, dibentuklah sebuah organisasi bernama *Mekong River Commission* atau yang biasa disingkat dengan MRC di tahun 1995. Komisi ini berawal dari kerja sama antara empat negara yaitu Thailand, Kamboja, Laos dan Vietnam pada tahun 1957 di bawah nama Mekong Committee.<sup>3</sup> Mekong River Commission dibentuk sebagai wujud dari kesepakatan bersama untuk melakukan kerja sama untuk melakukan koordinasi atas pembangunan sumber air di antara negara–negara tepi aliran dan potensi Sungai Mekong.<sup>4</sup> Meskipun MRC merupakan organisasi tertua untuk mengatur Sungai Mekong, pengaruh dan kekuatan yang dimiliki

<sup>3</sup> Awani Irewati. “Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong Antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara,” *Jurnal Bagian Politik P3LIPI*, Vol. 13 (2016) hal. 83-90.

<sup>4</sup> Tim Summers, “China and The Mekong Region”, *China Perspective*, No. 3, (2008) hal. 69.

MRC masih belum bisa membuat pemanfaatan sumber daya alam Sungai Mekong terdistribusi secara merata. Hal ini dikarenakan MRC merupakan organisasi yang terbilang lemah dan tidak memiliki cukup wewenang untuk menyelesaikan perkara masalah antar negara anggota.<sup>5</sup> Selain itu, negara-negara wilayah Sungai Mekong juga dihadapkan pada keberadaan Tiongkok yang berada di hulu sungai. Tiongkok lebih memiliki pengaruh dominan di kawasan Sungai Mekong karena perbedaan power yang sangat besar antara Tiongkok dengan negara-negara tepi Sungai Mekong lainnya.<sup>6</sup>

Hubungan Tiongkok dengan organisasi MRC diawali dengan kurang antusiasnya Tiongkok untuk bekerja sama dengan organisasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari keputusan Tiongkok dalam membangun beberapa bendungan di hulu sungai tanpa berkompromi dengan negara-negara lainnya di Sungai Mekong.<sup>7</sup> Namun pada tahun 2000-an, terdapat perubahan pola tindakan Tiongkok dengan negara-negara Sungai Mekong. Tiongkok mulai aktif berkolaborasi dengan *Mekong River Commission*.<sup>8</sup> Perubahan pola tindakan Tiongkok terhadap kerja sama dengan MRC menimbulkan tanda tanya mengenai motif ataupun alasan Tiongkok yang awalnya enggan bekerja sama justru meningkatkan kolaborasi dengan *Mekong River Commission*.

## KERANGKA TEORI

### a. Perspektif: Neorealisme

Neorealisme melihat bahwa perilaku negara dalam politik

<sup>5</sup> Heejin Han, "China, an Upstream Hegemon: A Destabilizer for the Governance of the Mekong River?" *Inha Journal of International Studies*, Vol. 32, No. 1, (2017) hal. 34-35

<sup>6</sup> Han, Ibid. hal 36-38

<sup>7</sup> Han, Ibid. hal. 38-39

<sup>8</sup> Han, Ibid, hal. 40-43

internasional tidak dipengaruhi oleh sifat dasar manusia yang penuh konflik.<sup>9</sup> Menurut pandangan kelompok neorealis, yang lebih berpengaruh adalah struktur internasional yang bersifat anarki. Anarki dapat diartikan sebagai kondisi tanpa pemerintah dunia yang berarti tidak adanya supremasi yang berdaulat dalam pembuatan kebijakan atau hukum di atas level negara. Negara hanya dapat membuat aturan dan menerapkannya dalam wilayah kedaulatannya. Struktur ini memaksa negara untuk bertindak agresif dalam meningkatkan keamanan dan pertahanan karena tidak adanya jaminan negara lain tidak akan menyerang sehingga kondisi menjadi semakin anarkis.<sup>10</sup>

Mengenai kerja sama internasional, berbeda dengan realisme yang sangat pesimis terhadap kerja sama, neorealisme mengakui adanya probabilitas negara-negara untuk melakukan kerja sama. Neorealisme menganggap bahwa kerja sama antar negara akan membuka kesempatan untuk menerapkan kekuatan demi meraih kepentingan dan keuntungan negara, terutama untuk mempertahankan eksistensi negara (*survival*).<sup>11</sup>

### b. Tingkat Analisis: Sistem Internasional

Penelitian ini menggunakan tingkat analisis sistem internasional.

<sup>9</sup> Radityo Dharmaputra. "Neorealisme" dari Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik. Editor: Vinsensio Dugis. Surabaya: CSGS, 2016

<sup>10</sup> Ken Booth, *Security in Anarchy: Utopian Realism in Theory and Practice. International Affairs* (Royal Institute of International Affairs, 1994) hal. 50-55

<sup>11</sup> Kenneth Waltz, *Theory of International Politics* (Boston: Addison-Wesley, 1979) dalam *Teori-Teori Hubungan Internasional: Perspektif Klasik*. Ed. Dugis, Vinsensio. Surabaya: CSGS.

Pada dasarnya, aktor-aktor hubungan internasional merupakan suatu unit yang terdapat dalam sistem internasional. Semua aktor bertindak dan berinteraksi dalam sistem tersebut. Sehingga dinamika yang terjadi dalam sistem internasional mempengaruhi perilaku dan aktor yang terdapat di dalamnya.<sup>12</sup>

Tingkat analisis sistem dapat memberikan pola umum tentang perilaku negara dan tingkat saling ketergantungan di antara negara-negara. Maka dari itu sistem tingkat analisis sistem internasional disebut sebagai tingkat analisis yang paling komprehensif. Tingkat ini akan menjelaskan mengenai pengaruh distribusi power antar negara-negara super power terhadap negara – negara lain.<sup>13</sup> Tingkat analisis sistem internasional juga melihat bagaimana hubungan antar negara–negara super power dan memiliki hegemon yang tinggi menjadi faktor yang menentukan jalannya politik internasional. Dengan tingkat analisis ini, penulis ingin melihat bagaimana sistem internasional mempengaruhi perubahan pola peningkatan kerja sama yang dilakukan oleh negara hegemon terhadap negara-negara di sekitarnya.

### **c. Teori Pengaruh Hegemon dalam Kerja Sama Internasional**

Robert Keohane mendefinisikan hegemon sebagai negara yang cukup kuat dan bersedia untuk mempertahankan aturan penting yang mengatur hubungan antar negara di dalam sebuah kerja sama.<sup>14</sup> Maka dari itu, Robert Keohane menyimpulkan

---

<sup>12</sup> Mas'ood, Ibid, hal. 45-46

<sup>13</sup> Yessi Olivia, "Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional" *Jurnal Transnasional*, Vol. 5, No. 1, (2013)

<sup>14</sup> Keohane, Ibid, hal. 18-19

bahwa hegemon tidak dapat dipisahkan dari kerja sama.<sup>15</sup> John Mearsheimer berpendapat bahwa tujuan utama negara ialah untuk mencapai kekuatan (*struggle for power*) dan tujuan negara berinteraksi dalam hubungan internasional adalah untuk menjadi negara hegemon.<sup>16</sup> Maka dari itu, kerja sama hegemon sangat mungkin terjadi dalam sistem internasional yang anarki karena setiap negara pada akhirnya melakukan kerja sama untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Dalam suatu kerja sama internasional, negara hegemon yang memiliki pengaruh paling kuat akan mudah mempengaruhi kebijakan dan regulasi dalam kerja sama tersebut.

Secara geografis, Tiongkok terletak pada bagian hulu Sungai Mekong. Setiap hal yang terjadi di bagian hulu sungai akan berdampak pada bagian hilir sungai.<sup>17</sup> Kondisi tersebut merupakan suatu keuntungan bagi Tiongkok karena situasi Sungai Mekong cukup bergantung pada Tiongkok. Tiongkok dapat mengontrol pelepasan air ke hilir dan menggunakan menggunakan hal tersebut sebagai daya tawar untuk negosiasi. Hal ini menunjukkan Tiongkok sebagai hegemon karena memiliki *power* yang besar dan posisi yang dominan strategis jika dilihat dari aspek geografis.

### **d. Konsep Kepentingan Nasional**

Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional yang digunakan oleh Donald E. Nuchterlain.

---

<sup>15</sup> Keohane, Ibid, hal. 22-25

<sup>16</sup> John Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics* (W.W. Norton, 2001) dalam *Teori-Teori Hubungan Internasional : Perspektif Klasik*. Ed. Dugis, Vinsensio. Surabaya : CSGS

<sup>17</sup> Michelle Ribka dan Anak Agung Banyu Perwita, "Water Security in The Mekong River and Regional Stability in Southeast Asia", *AEGIS*, Vol. 2, No. 1, (2017) hal. 26.

Nuchterlain mengemukakan kepentingan nasional sebagai kebutuhan dan keinginan yang dimiliki oleh suatu negara berdaulat dalam hubungannya dengan negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya. Kepentingan nasional inilah yang memberikan kontribusi yang besar bagi pandangan pandangan keluar bagi suatu bangsa.

Kepentingan nasional yang ingin dicapai Tiongkok disini ialah kepentingan ekonomi. Pencapaian kepentingan ekonomi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di negaranya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Tiongkok bagian barat serta memenuhi kebutuhan energinya. Untuk mencapai kepentingan tersebut Tiongkok membuat kebijakan *Western Development Strategy* yang salah satu strateginya adalah membangun bendungan *hydropower* di Sungai Mekong.<sup>18</sup> Selain itu, Tiongkok meningkatkan kerja sama dengan *Mekong River Commission* berhubungan dengan memasarkan hasil industrinya di kawasan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Mengenai *Mekong River Commission*

Pada tahun 1995, Thailand, Laos, Kamboja dan Vietnam menandatangani *Agreement on The Cooperation for Sustainable Development of the Mekong River Basin* atau yang biasa disebut Perjanjian 1995. Perjanjian ini membawa perubahan identitas untuk organisasi yang sebelumnya dikenal sebagai *Mekong Committee* berubah menjadi *Mekong River Commission* dengan

beranggotakan Thailand, Kamboja, Laos dan Vietnam. Keempat negara tersebut melihat adanya kepentingan bersama dalam mengelola sumber daya air dan mengembangkan potensi ekonomi sungai. Organisasi ini tidak lagi di bawah naungan PBB dan memiliki tanggung jawab penuh manajemen Komisi kepada Dewan dari negara-negara anggota.

MRC merupakan wadah untuk diplomasi dan kerja sama regional dimana negara-negara anggota berbagi manfaat dari sumber daya air yang sama terlepas dari berbagai kepentingan nasional. MRC berperan sebagai instrumen dan arena bagi negara-negara anggotanya untuk berdiskusi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Sungai Mekong. MRC juga bertindak sebagai pusat pengetahuan regional tentang manajemen sumber daya air yang membantu menginformasikan proses pengambilan keputusan berdasarkan bukti ilmiah. Sebagai badan fasilitasi dan penasihat regional yang diperintah oleh menteri air dan lingkungan dari empat negara, MRC memastikan pengembangan Sungai Mekong yang efisien dan saling menguntungkan sekaligus meminimalisir dampak yang berpotensi membahayakan masyarakat dan lingkungan di kawasan Sungai Mekong.<sup>19</sup>

MRC terdiri dari tiga badan permanen yaitu Dewan, Komite Bersama dan Sekretariat.<sup>20</sup> Dewan terdiri atas satu anggota dari setiap negara di tingkat menteri atau kabinet. Dewan membuat keputusan kebijakan dan memberikan panduan lain yang diperlukan mengenai promosi, dukungan, kerja sama, dan koordinasi kegiatan dan program bersama. Komite Bersama terdiri atas satu pejabat senior dari masing-masing negara dan minimal

<sup>18</sup> Alberta Nastiti, "Kepentingan Tiongkok dalam Pembangunan Bendungan di Sungai Mekong," *Jurnal Analisis Hubungan Internasional Universitas Airlangga*, Vol. 6, No. 1, (2017) hal. 65-68

<sup>19</sup> "About the MRC," *Mekong River Commission*, diakses pada 16 Februari 2020, <http://www.mrcmekong.org/about-mrc/>

<sup>20</sup> Gerlak dan Haefner, Op. Cit. hal. 3

berada di tingkat Kepala Departemen dan didukung oleh lembaga nasional seperti Departemen Luar Negeri. Komite Bersama bertanggung jawab atas implementasi kebijakan dan keputusan Dewan dan mengawasi kegiatan Sekretariat Komisi Sungai Mekong. Sekretariat MRC merupakan cabang operasional MRC yang menyediakan layanan teknis dan administrasi untuk Dewan dan Komite Bersama. Sekretariat MRC memfasilitasi pertemuan regional antara negara-negara anggota dan memberikan saran teknis tentang perencanaan bersama, koordinasi dan kerja sama.

### **Hubungan Kerja Sama Tiongkok dengan *Mekong River Commission***

Timo Menniken menyatakan bahwa tidak mengherankan jika sebuah negara yang terletak di bagian hulu sungai bersifat dominan secara sosial dan ekonomi karena dapat mengembangkan sumber daya yang ada dengan baik meskipun tidak ada kerja sama dengan negara sekitar sungai. Bahkan di sisi lain, negara hulu menganggap kerja sama belum pasti menguntungkan justru sulit diimplementasikan karena harus menyamakan visi dengan latar belakang yang berbeda-beda.<sup>21</sup>

Pihak yang paling membutuhkan kerja sama ini adalah negara-negara riparian lain selain Tiongkok karena mereka tak bisa memastikan data aliran sungai jika Tiongkok tidak bekerja sama. Dengan kata lain Tiongkok memegang “kartu kunci” di kawasan tersebut.<sup>22</sup> Hal ini menyebabkan Tiongkok pada awalnya tak begitu tertarik untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara bagian hilir sungai khususnya dengan organisasi *Mekong River Commission*. Tiongkok menolak untuk menjadi bagian inti dari organisasi tersebut dan hanya bersedia

menjadi mitra dialog. Tiongkok hanya bersedia bekerja sama pada isu-isu tertentu seperti navigasi dan perdagangan yang akan bermanfaat baginya.<sup>23</sup>

Tiongkok menyetujui untuk menjadi mitra dialog untuk MRC pada Juli 1996. Namun, Tiongkok bersikap enggan mengikuti perjanjian-perjanjian mengenai sungai Mekong dan lebih mementingkan kepentingan nasionalnya sendiri. Selain itu, kurangnya transparansi Tiongkok mengenai aliran air dan operasi bendungan telah mempersulit negara bagian hilir untuk melakukan pendekatan kerja sama. Ditambah lagi, Tiongkok sering meremehkan dampak negatif bendungan terhadap keadaan sosial dan lingkungan.<sup>24</sup> Tiongkok bertindak pasif dalam hal pembangunan institusi dan peningkatan kerja sama terkait Sungai Mekong. Tiongkok juga membatasi kerja sama dengan negara riparian lain untuk mengembangkan potensi Sungai Mekong. Sikap Tiongkok yang acuh terhadap MRC mulai berkurang sejak memasuki tahun 2000-an, Tiongkok mulai meningkatkan kerja sama dengan *Mekong River Commission*.

### **Status Tiongkok sebagai Negara Hegemon di Sungai Mekong**

Negara yang memiliki kekuatan terbesar dalam berbagai aspek disebut negara hegemon. Negara hegemon dapat berkontribusi dan mempengaruhi arah kerja sama internasional melalui kekuatan dan kapabilitas yang dimilikinya.<sup>25</sup> Sebuah negara dapat dikatakan sebagai hegemoni ketika negara itu merupakan satu-satunya kekuatan besar yang ada di sebuah kawasan. Ketika di sebuah kawasan terdapat lebih dari satu negara yang memiliki kekuatan besar maka negara tersebut tidak bisa disebut sebagai

<sup>21</sup> Menniken, Op. Cit. hal. 105

<sup>22</sup> Liebman, Op. Cit. hal. 290

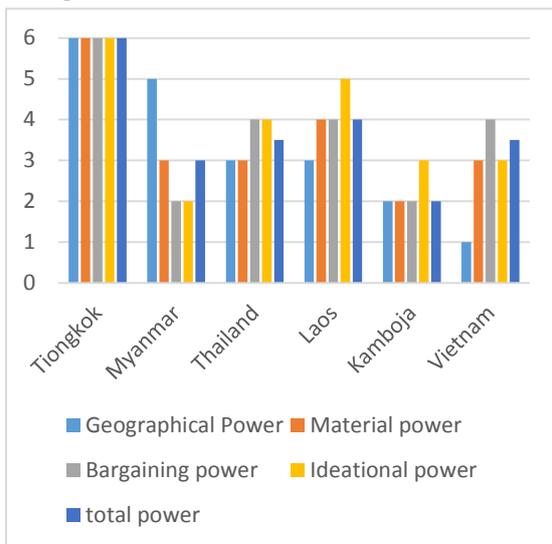
<sup>23</sup> Liebman, Ibid, hal. 296

<sup>24</sup> Han, Ibid, hal. 38

<sup>25</sup> Han, Op. Cit. hal. 32

negara hegemon.<sup>26</sup> Menurut Cascão dan Zeitoun<sup>27</sup> yang dikutip dari Rein, terdapat empat dimensi *power* yang bisa menjadikan sebuah negara menjadi hegemon di kawasan sungai lintas batas. Empat dimensi *power* tersebut adalah *geographical power*, *material power*, *bargaining power* dan *ideational power*.

**Diagram 1. Distribusi Kekuatan**



Hegemony on Sharing Transboundary Water,” hal. 147

Diagram diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan (asimetri) kekuatan yang jelas antara negara bagian hulu dan hilir. Tiongkok jelas menjadi hegemon yang kuat dalam segala aspek. Sedangkan negara non-hegemon memiliki porsi kekuatan yang relatif tak jauh berbeda dan memiliki keunggulan di posisi tertentu. Selain bisa mengontrol masalah aliran sungai karena posisinya yang terletak di bagian hulu sungai, Tiongkok juga memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang dapat mencegah negara-negara bagian hilir sungai ikut campur dengan masalah aliran sungai bagian hulu.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Kugler dan Tamen, Op. Cit. hal. 82

<sup>27</sup> Marlen Rein, “Power Asymmetry in the Mekong River Basin: The Impact of Hydro-Hegemony on Sharing Transboundary Water,” *Vienna Journal of East Asian Studies*, Vol.8, (2016), hal. 132-145

<sup>28</sup> Liebman, Op. Cit. hal. 290

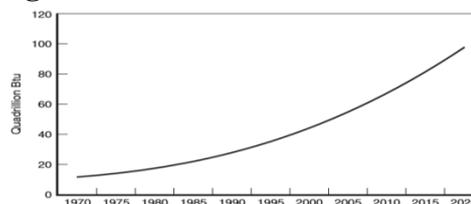
Dapat dikatakan bahwa di kawasan sungai Mekong, Tiongkok merupakan negara yang paling kuat diantara negara-negara sekitar sungai lainnya. Hal ini bisa dilihat dari segala aspek dimana Tiongkok memiliki pengaruh yang dominan.

Dengan status hegemon yang dimilikinya, Tiongkok dapat mempengaruhi jalannya kebijakan untuk kawasan sekitar Sungai Mekong. Tiongkok mengklaim negaranya sebagai ‘*peaceful rise*’ dimana hegemon dan peningkatan kekuatan negaranya tidak akan menimbulkan ancaman dan menciptakan *win-win solution* dengan negara-negara di sekitar Sungai Mekong. Pemerintah Tiongkok cemas karena negara-negara di sekitar sungai akan beranggapan bahwa kebangkitan Tiongkok akan mengubahnya menjadi hegemon agresif yang menggunakan kekuatannya untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri.<sup>29</sup>

Walaupun negara bagian hilir sangat dirugikan namun mereka tidak bisa melakukan perlawanan karena adanya perbedaan kekuatan yang sangat besar. Ditambah lagi, Tiongkok cukup berperan dan berpengaruh di negara bagian hilir. Misalnya Kamboja yang mendapat banyak bantuan dan investasi dari Tiongkok khususnya di bidang infrastruktur.<sup>30</sup>

### Peningkatan Kebutuhan Energi di Tiongkok

**Grafik 2. Konsumsi Energi Tiongkok 1970-2020**



<sup>29</sup> Liebman, Ibid, hal. 281

<sup>30</sup> Evelyn Goh, “China in the Mekong River Basin: The Regional Security Implications of Resource Development on The Lancang Jiang,” *Institute of Defence and Strategic Studies Singapore*, No.69 (2004), hal. 11

sumber: International Energy Outlook

Tiongkok membutuhkan pasokan energi yang tinggi untuk tetap menjalankan industri dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi negaranya. Dengan industri yang meningkat dan tingkat populasi tertinggi di dunia, Tiongkok menjadi negara dengan tingkat konsumsi energi paling besar di dunia. Konsumsi energi Tiongkok akan terus meningkat seiring dengan ekonominya.<sup>31</sup>

Grafik di atas menunjukkan bahwa total konsumsi energi Tiongkok meningkat dari <18 quadrillion Btu pada tahun 1980 menjadi 37.1 quadrillion Btu pada tahun 1996. Tiongkok menargetkan untuk mencapai 98.3 quadrillion Btu pada tahun 2020. Dikarenakan batubara mengalami kelangkaan maka penting untuk mengembangkan sumber energi alternatif atau terbarukan.<sup>32</sup> Sungai Mekong berpotensi untuk menjadi sumber energi dengan memafaatkannya untuk membangun bendungan *hydropower*.<sup>33</sup> Tiongkok berencana untuk mencapai kapasitas *hydropower* hingga 300 juta kW pada tahun 2020 untuk memenuhi kebutuhan energi dari pertumbuhan industri dan ekonomi.<sup>34</sup> Untuk mencapai targetnya, Tiongkok membangun proyek '*Cascade Eight Dams*' yaitu proyek pembangunan delapan bendungan raksasa.<sup>35</sup> Sumber energi terbarukan yang menjadi fokus pemerintah Tiongkok adalah *hydropower*. Selain untuk memenuhi kebutuhan energi agar bisa tetap menjaga laju ekonomi, kebijakan Tiongkok untuk membangun

bendungan di kawasan Sungai Mekong juga berkaitan dengan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Tiongkok bagian barat. Secara umum, wilayah Tiongkok terdiri dari tiga bagian yaitu bagian timur, tengah dan barat. Terdapat kesenjangan ekonomi diantara tiga wilayah tersebut. Wilayah bagian barat yang terdiri dari provinsi Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang, Sichuan, Congqing, Guizhou, Yunnan dan Tibet merupakan wilayah dengan tingkat ekonomi dan kesejahteraan rendah.<sup>36</sup> Untuk meningkatkan beberapa sektor di wilayah barat diperlukan energi dalam jumlah besar. Total energi yang diperlukan untuk sektor industri saja bahkan mencapai 70% dari total konsumsi energi negara. Tiongkok memerlukan sumber daya air Sungai Mekong untuk proyek bendungan *hydropower* yang dapat menghasilkan energi dalam jumlah besar agar kebutuhan energinya terpenuhi seiring dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Selain itu juga kebijakan ini berujung pada peningkatan berbagai sektor di wilayah Tiongkok bagian barat dan mengurangi kesenjangan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan di Tiongkok.

### **Perubahan Sikap Tiongkok Terhadap *Mekong River Commission***

Berbanding terbalik dengan sikap Tiongkok yang dulunya sangat acuh terhadap kerja sama dengan *Mekong River Commission*, pada tahun 2000-an Tiongkok mulai meningkatkan kerja sama dengan Tiongkok di berbagai bidang. Pada November 2002, Tiongkok menandatangani perjanjian pertukaran data hidrologi dengan MRC dimana Tiongkok harus menyajikan

<sup>31</sup> World Bank, *China 2020: Development Challenges in the New Century*, Washington, DC, 1997, hal. 21

<sup>32</sup> Nastiti, *Op. Cit.* hal. 65

<sup>33</sup> Urban, Khatri, Norodensvard dan Wang, *Op. Cit.* hal. 8

<sup>34</sup> Urban, *Ibid*, hal. 16

<sup>35</sup> Menniken, *Op. Cit.* hal. 113

<sup>36</sup> Nastiti *Op. Cit.* hal. 68-69

data level air harian di bagian hulu sungai agar negara bagian hilir bisa berantisipasi terhadap banjir dan masalah yang berkaitan lainnya.<sup>37</sup> Perjanjian ini mengharuskan Tiongkok untuk melapor setiap 24 jam selama musim hujan. Tiongkok yang tetap menjadi rekan dialog telah terlibat lebih banyak dalam pertukaran informasi khususnya mengenai data hidrologi, tindakan ini berkontribusi untuk membangun kepercayaan antara Tiongkok dan MRC.

Kerja sama antara Tiongkok dan MRC dalam bidang informasi terus berlanjut. Pada tahun 2004, MRC mengajukan permintaan informasi tentang bendungan Tiongkok pada Beijing. Dalam satu tahun, Tiongkok setuju untuk mengadakan diskusi teknis manajemen banjir dengan MRC. Pada tahun 2008, Kementerian Sumber Daya Air Tiongkok dan keempat negara MRC memperbarui perjanjian untuk berbagi data ketinggian air selama musim banjir. Perubahan yang mengejutkan terjadi pada tahun 2010 dimana Tiongkok setuju untuk berbagi data hidrologi tidak hanya pada masa banjir namun ketika musim kemarau juga.<sup>38</sup>

Selain itu, Lembaga Penelitian Sumber Daya Air dan Tenaga Air yang berada di bawah naungan Kementerian Sumber Daya Air Tiongkok telah mengundang 17 ahli dari lima negara Mekong lainnya untuk menjalani pelatihan mengenai mitigasi bencana dan pengendalian banjir selama dua minggu. Dalam kegiatan ini, Tiongkok berjanji untuk mempererat kerja sama dengan negara hilir dan tak lagi bertindak secara sepihak. Tak hanya pada bidang hidrologi dan navigasi, kerja sama antara Tiongkok dan MRC

juga meningkat di bidang lainnya seperti keamanan.

Pada 2013, Tiongkok memperpanjang periode untuk berbagi data dari empat menjadi lima bulan (dari awal Juni hingga akhir Oktober). Tiongkok juga setuju untuk meningkatkan frekuensi data yang dikirim ke MRC dari satu kali menjadi dua kali sehari dan menyatakan keinginannya untuk berbagi data selama musim kemarau jika terjadi keadaan darurat kekeringan. Perpanjangan perjanjian adalah tanda kepercayaan berkelanjutan antara MRC dan Tiongkok.<sup>39</sup> Pada November 2014, Tiongkok bersama dengan Laos, Myanmar dan Thailand melakukan 28 latihan patrol sungai bersama untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan bertujuan memerangi perdagangan manusia, pembajakan dan pengedaran narkoba.<sup>40</sup>

Tiongkok juga memperdalam kerja sama di sektor energi. Tiongkok telah terlibat dalam pengembangan tenaga air di negara bagian hilir. Pihak Tiongkok terlibat sebagai kontraktor, regulator dan penyedia dana di lebih dari 50 proyek tenaga air di Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Di Laos dan Kamboja, Tiongkok diketahui terlibat dalam 21 proyek pembangkit listrik tenaga air sebagai investor atau pengembang. Tiongkok juga menandatangani nota kesepahaman dengan Thailand yang setuju untuk mengeksplorasi 3000 MW setiap tahunnya di mulai tahun 2017. Fakta ini juga menunjukkan posisi Tiongkok sebagai hegemon dimana negara lain cukup bergantung pada kekuatan Tiongkok terutama di bidang ekonomi. Tiongkok

---

<sup>37</sup> Liebman, Op. Cit. hal. 292

<sup>38</sup> Han, Op. Cit. hal. 40

---

<sup>39</sup> Mekong River Commission, <http://www.mrcmekong.org/about-mrc/upstream-partners/> diakses pada 17 April 2020

<sup>40</sup> Han, Op. Cit. hal. 42

menjadi pemain dominan dalam investasi dan perdagangan di sektor energi. Meskipun begitu, Tiongkok tidak lagi dapat bertindak sepihak karena Tiongkok sendiri juga memiliki minat yang besar dalam mempromosikan industri tenaga air dan investasi di wilayah Mekong.

Pada tahun 2019 lalu Tiongkok dan MRC memperbaharui perjanjian tentang penyediaan data air dan inisiatif kerja sama lainnya. Tiongkok telah sepakat untuk terus berbagi data hidrologi dengan MRC dan akan berkontribusi pada pemantauan sungai dan perkiraan banjir yang lebih baik di Sungai Mekong. Data *real-time* yang disediakan oleh Tiongkok memungkinkan negara-negara anggota MRC untuk memperkuat pemantauan ketinggian air sungai mereka dan meningkatkan keakuratan perkiraan banjir serta mengurangi dampak negatif dari banjir. Dengan kerja sama yang diperbarui, Tiongkok sepakat untuk mempertahankan periode dan frekuensi berbagi data hidrologi yang sama. Berbagi dilakukan dua kali sehari selama lima bulan, mulai dari 1 Juni hingga 31 Oktober, setiap tahun.<sup>41</sup>

### **Motif Tiongkok Meningkatkan Kerja Sama dengan Mekong River Commission**

Tiongkok memiliki kepentingan besar di kawasan Sungai Mekong. Untuk mencapai kepentingannya Tiongkok harus bisa mempertahankan statusnya sebagai hegemon. Salah satu cara untuk mempertahankan status hegemon adalah melalui pembuatan aturan-aturan di kawasan Sungai Mekong. Motif Tiongkok meningkatkan

---

<sup>41</sup> Mekong River Commission, <http://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/mrc-and-china-renew-pact-on-water-data-provision-and-other-cooperation-initiatives/> diakses pada 17 April 2020

kerja sama dengan MRC karena Tiongkok ingin terlibat dan bisa mempengaruhi peraturan-peraturan yang akan menguntungkan negaranya sendiri.

Untuk mendapatkan kesediaan dari negara-negara hilir, Tiongkok menggunakan hegemonnya melalui kerja sama ekonomi atau lebih tepatnya berinvestasi di negara-negara hilir yang merupakan anggota dari MRC. Dikarenakan kebutuhan energi semakin meningkat, hal itu menyebabkan peningkatan investasi di bagian hilir Sungai Mekong.<sup>42</sup> Dengan banyaknya investasi dan bantuan ekonomi yang diberikan Tiongkok pada negara bagian hilir dan meningkatkan kerja sama dengan MRC akan membuat posisi Tiongkok semakin dominan dan mempertahankan status Tiongkok sebagai hegemon. Dengan menjadi hegemon, Tiongkok memiliki *power* untuk mempengaruhi bahkan membuat aturan sesuai kehendaknya di Sungai Mekong meskipun Tiongkok bukan anggota MRC. Jika peraturan dibuat atas kehendak Tiongkok maka peraturan tersebut tentu akan mendukung kebutuhan Tiongkok dan membuat Tiongkok kepentingan nasionalnya untuk pemenuhan kebutuhan energi dan tetap meningkatkan laju ekonomi.

Hubungan kerja sama yang baik akan mengamankan status hegemon Tiongkok dan membuat proyek bendungan Tiongkok tetap bisa berjalan. Dengan begitu besaran energi yang dibutuhkan Tiongkok bisa terpenuhi melalui hydropower. Kebutuhan energi yang terpenuhi dapat meningkatkan perkembangan industri dan berujung pada peningkatan ekonomi Tiongkok. Ketika energi terpenuhi dan ekonomi terus meningkat, Tiongkok dapat melakukan peningkatan

---

<sup>42</sup> Urban Op. Cit. hal. 8

berbagai sektor di wilayah Tiongkok bagian barat dan mengurangi kesenjangan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan di Tiongkok.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisa data. Awalnya Tiongkok sangat tidak antusias untuk bekerja sama dengan MRC bahkan menolak untuk bergabung dengan MRC dan hanya bersedia menjadi rekan dialog saja. Setelah menjadi rekan dialog pun Tiongkok belum membuka diri untuk melakukan kerja sama malah membuat keputusan yang dapat membahayakan keempat negara MRC yaitu membangun bendungan Manwan yang dibangun di daerah hulu sungai.

Pada awal tahun 2000-an Tiongkok mulai meningkatkan kerja sama dengan MRC dan bahkan memberikan investasi besar kepada keempat negara MRC. Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan dengan menggunakan teori pengaruh hegemon dan konsep kepentingan nasional, alasan Tiongkok meningkatkan kerja sama secara general bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional yang dibutuhkan Tiongkok dalam hal ini adalah memenuhi kebutuhan energi negaranya agar bisa tetap meningkatkan laju ekonomi dan mengembangkan industri di daerah Tiongkok bagian barat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan Tiongkok.

Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya tersebut maka Tiongkok memulainya dengan rencana pembangunan bendungan *hydropower* guna memenuhi kebutuhan energi. Rencana pembangunan *hydropower*

tersebut mengundang banyak kritik dari berbagai pihak dikarenakan dampak buruk yang menimpa Sungai Mekong khususnya negara bagian hilir sangatlah besar. Untuk mengatasi hal tersebut, Tiongkok menggunakan statusnya sebagai negara hegemon di Sungai Mekong yang dapat mempengaruhi peraturan di wilayah sungai tersebut. Tiongkok perlu untuk mempertegas status hegemonnya agar negara bagian hilir tidak membantah aturan yang telah diatur oleh Tiongkok. Untuk mendapatkan kesediaan dari negara-negara hilir, Tiongkok menggunakan hegemonnya melalui kerja sama ekonomi atau lebih tepatnya berinvestasi di negara-negara hilir yang merupakan anggota dari MRC.

Pada teori pengaruh hegemon dalam kerja sama internasional, salah satu cara untuk mempertahankan status hegemon adalah melalui pembuatan aturan-aturan di kawasan Sungai Mekong. Dilihat dari pendekatan neorealisme, Tiongkok meningkatkan keuntungan ekonomi dan mempertegas statusnya sebagai hegemon. Dapat disimpulkan bahwa motif Tiongkok meningkatkan kerja sama dengan MRC karena Tiongkok ingin terlibat dan bisa mempengaruhi peraturan-peraturan yang akan menguntungkan negaranya sendiri. Dengan peningkatan kerja sama ini Tiongkok bisa membuat peraturan yang dapat memenuhi kepentingan nasionalnya sendiri.

## REFERENSI

### Buku:

- Baylis, John dan Steve Smith. *The Globalization of World Politics (2nd eds.)*. New York: Oxford University Press, 2001.
- Booth, Ken. *Security in Anarchy: Utopian Realism in Theory and Practice. International Affairs*.

- Royal Institute of International Affairs, 1994.
- Dugis, Vinsensio. *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global strategis, 2016.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition*. New York: Oxford University Press Inc, 2013.
- Keohane, Robert. *After Hegemony*. Princeton, N.J: Princeton University Press, 1984.
- Mas'ood, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Mearsheimer, John. *The Tragedy of Great Power Politics*. W.W. Norton, 2001.
- Waltz, Kenneth. *Theory of International Politics*. Boston: Addison-Wesley, 1979.
- Coplin, William dan Marsedes Marbun. (Terj.) *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoretis*. Edisi Kedua. Bandung: Sinai Baru, 1992.
- Suyanto, Bagong dan Satinah. *Metode Penelitian Sosial sebagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Jurnal:**
- Alexander, Didang. "Upaya Tiongkok memenuhi Kebutuhan energi Nasional Melalui Shanghai Cooperation Organization," *Jurnal Analisis Hubungan Internasional Universitas Airlangga*, Vol. 7 No.1 (2018).
- Campbell, Ian. "Managing International River Basins: Successes and Failures of the Mekong River Commission," *Water Resources Planning and Management Cambridge University Press*, (2013).
- Cascao, Ana dan Mark Zeitoun. "Power, Hegemony and Critical Hydropolitics," *Transboundary Water Management: Principles and Practice*, (2010).
- Gerlak, Andrea dan Andrea Haefner. "Riparianization of the Mekong River Commission," *International Water Resources Association*, (2017).
- Gilpin, Robert. "The Theory of Hegemonic War." *Journal of Interdisciplinary History* 18, No. 4, (1988).
- Goh, Evelyn. "China in the Mekong River Basin: The Regional Security Implications of Resource Development on the Lancang Jiang," *Institute of Defence and Strategic Studies Singapore*, No.69 (2004).
- Han, Heejin. "China, An Upstream Hegemon: A Destabilizer for the Governance of the Mekong River?" *Inha Journal of International Studies Pasific Focus*, Vol. 32, No. 1, (2017).
- Irewati, Awani. "Problematisasi Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong Antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara." *Jurnal Bagian Politik Pusat Penelitian Politik LIPI*, Vol. 13, (2016).
- Kugler, Jacek dan Ronald Tamen. "Regional Challenge: China's Rise to Power," *Asia Pasific Center for Studies* (2004).
- Lee, Seungho. "Power Asymmetry over Hydropower Development in the

- Mekong River Basin,” *Korea University Research*, (2017)
- Liebman, Alex. “Trickle-down Hegemony? China’s “Peaceful Rise” and Dam Building on the Mekong,” *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 27, No. 2 (2005).
- Menniken, Timmo. “China’s Performance in International Resource Politics: Lessons from the Mekong,” *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 29, No. 1 (2007).
- Nastiti, Alberta. “Kepentingan Tiongkok dalam Pembangunan Bendungan di Sungai Mekong.” *Jurnal Analisis Hubungan Internasional Universitas Airlangga*, Vol. 6, No. 1, (2017).
- Nincic, Miroslav. “The National Interest and Its Interpretation.” *The Review of Politics*, Vol. 61, No.1, (1999).
- Nuchterlain, Donald. “National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Approach for Analysis and Decision Making.” *British Journal of International Relations Studies*, Vol. 2, No. 3, (1976).
- Olivia, Yessi. “Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional.” *Jurnal Transnasional*, Vol. 5, No. 1, (2013).
- Pedersen, Thomas. “Cooperative Hegemony Power, Ideas and Institutions in Regional Integration.” *Rev. Int. Stud.* 28, No 4, (2002).
- Prys, Miriam dan Stefan Robel. “Hegemoni, Not Empire.” *Journal of International Relations and Development* 14, No. 2, (2011).
- Rein, Marlen. , “Power Asymmetry in the Mekong River Basin: The Impact of Hydro-Hegemony on Sharing Transboundary Water,” *Vienna Journal of East Asian Studies*, Vol.8, (2016).
- Summers, Tim. “China and the Mekong Region.” *China Perspective*, No. 3, (2008).
- Urban, Frauke dkk. “Analysis of China’s Investment in the Hydropower Sector in the Greater Mekong Sub-Region” *Environment, Development and Sustainability*, Vol.15, (2012)
- Internet:**
- Brown, David. “*Vietnam Sweats Bullets as China and Laos Dam the Mekong*,” diakses pada 30 Mei 2020 dari <https://news.mongabay.com/2016/10/vietnam-sweats-bullets-as-china-laos-dam-the-mekong/>
- Choonhavan, Kraissak. “*Vietnam Screams for Halt to Mekong Dams as Delta silts Up*,” diakses pada 31 Mei 2020 dari <https://www.internationalrivers.org/resources/8341>
- Eyler, Brian. “*Science Shows Chinese dams Are devastating the Mekong*,” diakses pada 31 Mei 2020 dari <https://foreignpolicy.com/2020/04/22/science-shows-chinese-dams-devastating-mekong-river/>
- Fawthrop, Tom. “*Dams and Climate Change Kill the Mekong*,” diakses pada 31 Mei 2020 dari <https://yaleglobal.yale.edu/content/dams-and-climate-change-kill-mekong>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations, “*Mekong Basin: Geography, Population and Climate*”, 2011. Diakses pada 9 Februari 2019 dari

- <http://www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/mekong/index.stm>
- Funaiolo, Matthew dan Brian Hart, “*An Upswell of Solidarity: China’s Mekong Dams Face Online Backlash*,” diakses pada 31 Mei 2020 dari <https://www.csis.org/analysis/ups-well-solidarity-chinas-mekong-dams-face-online-backlash>
- Gerin, Roseanne. “*Cambodian Activists Board Boats to Protest Dam Construction in Laos*,” diakses pada 1 Juni 2020 dari <https://www.refworld.org/docid/5420351f14.html>
- Jennings, Ralph. “*Chinese Support Gives Laos an Edge over Powerful Neighbor Vietnam*,” diakses pada 30 Mei 2020 dari <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/chinese-support-gives-laos-edge-over-powerful-neighbor-vietnam>
- KBBI, diakses pada 24 Juni 2020 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/motif>
- Mekong River Commission, “*About Mekong River Commission*,” 2010, diakses pada 10 Oktober 2019 dari <http://www.mrcmekong.org/about-mrc/>
- Mekong River Commission, “*Agriculture and Irrigation Programme*,” 2010, diakses pada 18 Februari 2020 dari <http://www.mrcmekong.org/about-mrc/completion-of-strategic-cycle-2011-2015/agriculture-and-irrigation-programme/>
- Mekong River Commission, “*Basin Development Plan Programme*,” 2010, diakses pada 18 Februari 2020 dari <http://www.mrcmekong.org/about-mrc/completion-of-strategic-cycle-2011-2015/basin-development-plan-programme/>
- Putu Agung Nara Inda, “*Politik yang Mengalir di Sungai Mekong*” diakses pada Selasa, 7 Januari 2020 dari <https://tirto.id/politik-yang-mengalir-di-sungai-mekong-b43F>
- Sebastian Biba, “*China Drives Water Cooperation with Mekong Countries*,” 2016, diakses dari pada 10 Oktober 2019 dari <https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/8577-China-drives-water-cooperation-with-Mekong-countries>

### **Skripsi**

- Ji Won, Yeom. “Pembentukan Hegemoni.” Depok: Universitas Indonesia, 2015.
- Ranti, Putrimayshi, “Analisa Kerja Sama Lancang Mekong Cooperation (LMC) Tiongkok dengan Negara Kawasan Indochina Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air di Sungai Mekong,” Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 201

